

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022







KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) Tahun 2022. Laporan Kinerja Pusat PUU, selain merupakan media pertanggungjawaban kepada publik, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, serta tugas

pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang meliputi kegiatan dukungan bidang legislasi terhadap DPR RI.

Laporan Kinerja Pusat PUU Tahun 2022 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang dicapai pada Tahun 2022, serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja dan anggaran Pusat PUU dalam rangka pemberian dukungan keahlian atau "supporting system" kepada DPR RI, serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan layanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU), sebagai salah satu unit kerja Eselon II Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai fungsi menyelenggarakan penyiapan dan penyajian konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang untuk mendukung DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Pusat PUU telah menyelenggarakan penyiapan dan penyajian konsep awal naskah akademik dan konsep rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disusun dalam Renstra Pusat PUU Tahun 2020-2024, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, dan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pusat PUU Tahun 2022 menginformasikan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKT Tahun 2022, serta capaian kinerja dan aspek keuangan dalam kegiatan penyiapan dan penyajian konsep awal NA dan RUU, serta kebijakan yang dibuat oleh Kepala Pusat PUU.

Tahun 2022 Pusat PUU telah menetapkan target yaitu persentase sebesar 100% atas Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan kajian RUU dan persentase 100% atas RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademik, draf RUU, dan Kajian RUU. Kedua target tersebut berhasil dicapai oleh Pusat PUU di tahun 2022Penyusunan konsep awal naskah akademik dan draf RUU didasarkan pada permintaan baik dari Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi maupun Anggota DPR. Tahun 2022 Pusat PUU telah menyelesaikan sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsep awal NA dan draf RUU dari target tahunan sebanyak 18 (delapan belas) konsep awal NA dan draf RUU sehingga persentase capaian kinerja Pusat PUU dalam penyusunan konsep awal NA dan draf RUU sebesar 100%.

Selain kinerja terpenuhinya target penyusunan Naskah akademik dan draf RUU, target kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Perancangan Undang-Undang juga berhasil dicapai. Berdasarkan survei kepuasan Anggota DPR RI tahun 2022, Pusat PUU mendapatkan indeks kepuasan

sebesar 3,294 melebihi target indeks kepuasan Tahun 2022 sebesar 3,22. Sedangkan kinerja keuangan Pusat PUU juga telah melampaui target realisasi anggaran yang ditetapkan sebesar 95% sebagaimana dalam RKT dan Perjanjian kerja Tahun 2022, yaitu 99,15% dari Pagu Anggaran Pusat PUU atau sebesar Rp. 13.643.244.388,-.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU pada Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI.

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
ІКНТІ	SAR EKSEKUTIF	iii
DAFT	AR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum	2
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
1.4.	Aspek Strategis dan Permasalahan	8
1.5	Sistematika Penyajian	9
BAB II	I PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1.	Rencana Strategis	11
2.2.	Rencana Kerja Tahun 2022	13
2.3.	Perjanjian Kinerja	15
BAB II	II AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1.	Capaian Kinerja	20
3.2.	Evaluasi Kinerja	21
3.3.	Realisasi Anggaran	39
BAB IV	V PENUTUP	3





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah menyebutkan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara bagi setiap penyelenggara negara, dan asas akuntabilitas ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good government).

Dalam rangka mewujudkan good government maka setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dengan suatu rencana strategis kemudian dipertajam dengan perumusan rencana kerja yang merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis, dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diatas, maka Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) sebagai salah satu Pusat di bawah koordinasi Badan Keahlian DPR RI, wajib menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dalam rangka pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Pusat PUU di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Pusat PUU adalah sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat PUU merupakan salah satu pusat dari 5 (lima) pusat setingkat eselon II yang ada di lingkungan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Pasal 286 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI disebutkan bahwa Pusat PUU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang. Adapun dukungan di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
- b. penyiapan Naskah Akademik RUU;
- c. penyiapan penyusunan RUU; dan
- d. pendampingan pembahasan RUU.

Selain dukungan sebagaimana tersebut diatas, Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 287 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat PUU memiliki fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang;
- d. pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang;
- e. pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
- f. penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

1.3.2 Struktrur Organisasi

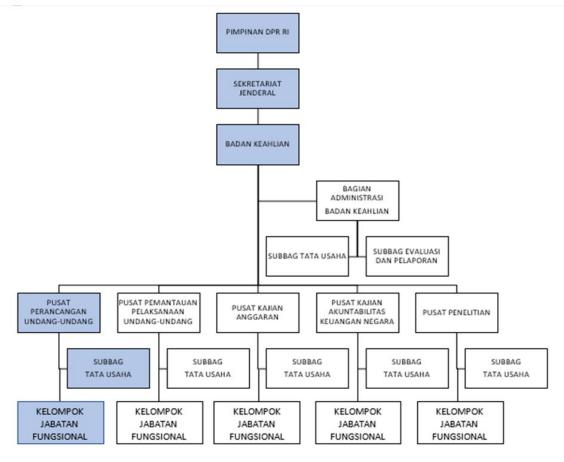
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kedudukan Pusat PUU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Dalam Pasal 285 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. Pusat Kajian Anggaran;

- c. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Pusat Penelitian;
- e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- f. Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan Pusat PUU dalam struktur organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tergambar dalam bagan Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1

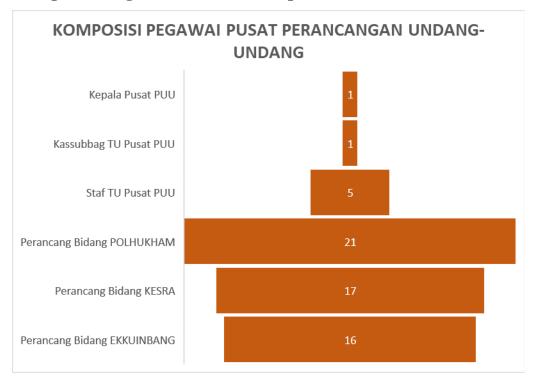
Bagan Kedudukan Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Struktur Organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

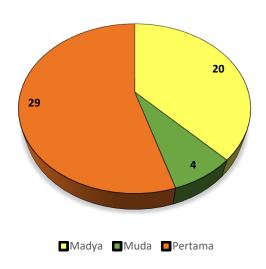
Berdasarkan kedudukan Pusat PUU dalam struktur organisasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, Pusat PUU memiliki struktur yang terdiri atas:

- Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
 Kepala Pusat PUU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.
- 2. Subbagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Subbagian Tata Usaha Pusat PUU mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat PUU.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat PUU adalah para perancang peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas memberikan bantuan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk anggota DPR RI. Pusat PUU membagi kelompok jabatan fungsional menjadi 3 (tiga) bidang tugas, yaitu perancang peraturan perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukham), Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang).

Tabel 1 Komposisi Pegawai Pusat PUU dapat terlihat dalam berikut:





Gambar 2 Komposisi Jenjang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan

Pusat PUU memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Keahlian dalam menyelenggarakan dukungan perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas. Namun dalam menjalankan peran strategis tersebut Pusat PUU memiliki beberapa permalasahan yaitu:

- Penyusunan NA dan RUU masih ditentukan oleh permintaan DPR RI, baik permintaan dari pimpinan DPR RI, pimpinan AKD, pimpinan fraksi, maupun dari anggota DPR RI secara perorangan. Tahun 2022, permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU diterima oleh Pusat PUU menjelang akhir tahun sehingga penyusunan NA dan RUU belum sepenuhnya dapat diselesaikan.
- 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terpenuhi, seperti ruang kerja dan ruang rapat internal dan ketersedian computer PC/laptop yang masih sangat terbatas.
- 3. Sumber daya manusia yang dimiliki Pusat PUU tidak seimbang dengan proporsi jumlah dan kompetensi SDM namun dituntut untuk bekerja secara optimal dalam memberikan dukungan layanan keahlian Perancangan Undang-Undang. Jumlah tenaga struktural (tata usaha) terbatas dalam mendukung administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan penyusunan NA dan RUU. Selain itu tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki masih belum komprehensif apabila dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPR RI di bidang keahlian legislasi.
- 4. Anggaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang seringkali tidak mencukupi dibandingan dengan banyaknya permintaan dari Alat Kelengkapan Dewan, pimpinan fraksi, maupun Anggota DPR untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang.

5. Pembukaan blokir anggaran pada Bulan November 2022 hanya sebesar Rp. 200.000.000,- dari Rp. 1.342.262.000,- menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, dan beberapa kegiatan terpaksa dilakukan secara hybrid

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Pusat PUU tahun 2022 terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum, kedudukan, tugas, dan fungsi Pusat PUU dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat mengenai Rencana Strategis (Renstra), Pencapaian Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat PUU Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Pusat PUU yang dilakukan melalui analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas aspek keuangan dalam rangka pencapaian sasaran rencana strategis tahun 2022.

Bab IV Penutup

Memuat simpulan menyeluruh dari LAKIP Pusat PUU tahun 2022 yang menguraikan tentang keberhasilan, hambatan, pemecahan masalah atas hambatan yang dihadapi dan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pusat PUU di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, dan kendala yang mungkin terjadi, telah disusun rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 oleh Badan Keahlian DPR RI sebagai dasar bagi Pusat PUU dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, serta tujuan yang dimiliki. Rumusan visi dan misi Pusat PUU mengacu pada visi dan misi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan program dukungan legislasi.

Dalam Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024, Pusat PUU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam hal perancangan undangundang. Bentuk dukungan keahlian Pusat PUU meliputi penyiapan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) baik atas permintaan anggota, komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI, serta memberikan pendampingan dalam pembahasan RUU antara DPR RI dan Pemerintah. Selain dukungan layanan perancangan undang-undang, Pusat PUU juga terlibat dalam memberikan dukungan penyiapan penyusunan peraturan DPR RI, peraturan Sekjen DPR RI, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya.

Untuk melaksanakan berbagai dukungan tersebut di atas, Pusat PUU telah membentuk Jabatan Fungsional Perancang Undang-Undang yang bertugas menyusun NA dan RUU serta mendampingi penyusunan dan pembahasan RUU di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dukungan keahlian pada fungsi legislasi juga diberikan dengan membentuk Tim Asistensi Penyusunan NA dan RUU sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik untuk melakukan perancangan RUU maupun pendampingan pembahasan RUU.

1. Visi

Visi Pusat PUU yaitu menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai "supporting system" DPR RI bidang keahlian perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas.

Organisasi pendukung bidang keahlian perancangan undangundang yang "profesional" mempunyai makna bahwa Pusat PUU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan sesuai dengan standar profesional pada bidangnya masing-masing, yaitu berorientasi kepada kinerja yang tinggi dengan berbasis kompetensi, keefisienan, keefektifan dan akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

"Akuntabel" mempunyai arti bahwa baik proses maupun hasil kerja Pusat UU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan "berkualitas" dalam arti hasil kerja Pusat PUU mengutamakan mutu atau kualitas, bukan hanya sekedar jumlah atau kuantitas NA dan RUU.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pusat Perancangan Undang-Undang, yaitu:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.



 Menjadi Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai "supporting system" DPR RI bidang keahlian perancangan undangundang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas.



- Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan
- Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai

Gambar 3 Visi dan Misi Pusat PUU

3. Tujuan

Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Pusat PUU. Untuk mengukur keberhasilan Pusat PUU dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan dari Pusat Perancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung arah politik legislasi Dewan.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung perkembangan pembangunan hukum nasional.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Komponen RKT meliputi sasaran dan indikator kinerja.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pusat PUU sebagai berikut:

- a. Penyediaan produk perancangan undang-undang yang tepat waktu dan tetap menjamin kualitasnya dalam arti memenuhi standar dan memuat data dan argumentasi ilmiah yang komprehensif dan mendalam mengenai substansi setiap NA.
- b. Penyediaan jumlah perancang undang-undang yang kompeten dalam penyusunan NA dan RUU melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Penyediaan produk-produk karya tulis ilmiah dan kajian rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang bermutu.

2. Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur pencapaian sasaran strategis Pusat PUU maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat PUU yaitu jumlah NA dan RUU yang dihasilkan oleh Pusat PUU sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel dan selaras dengan sasaran strategis Pusat PUU. Sasaran strategis dan indikator kerja utama tersebut ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun Pusat PUU Tahun 2022 sebagaimana tertera dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2

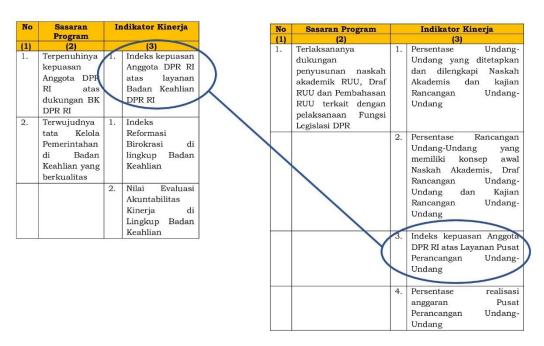
Rencana Kinerja Pusat PUU Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
1.	Terwujudnya	1. Persentase UU yang	
	dukungan	ditetapkan dan	100%
	penyusunan naskah	dilengkapi Naskah	
	akademik RUU, Draft	Akademis dan kajian	
	RUU dan	RUU	
	Pembahasan RUU	2. Persentase RUU yang	
	terkait dengan	memiliki konsep awal	100%
	pelaksanaan Fungsi	Naskah Akademis, Draft	
	Legislasi DPR RI	RUU dan kajian RUU	

3. Indeks	kepuasan	
Anggota DPR	RI atas	3,22
layanan Per	rancangan	
Undang-Undar	ng	
4. Persentase	realisasi	
anggaran	Pusat	92,5%
Perancangan	Undang-	
Undang		

Rencana Kinerja Pusat PUU Tahun 2022 telah sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan oleh Badan Keahlian untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang.

2.3. Perjanjian Kinerja



Berdasar Modul Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, bahwa Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja

ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah :1

- meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusat PUU telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. PK merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Substansi yang ada dalam RKT dan PK memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 serta mengacu pada Renstra Pusat PUU Tahun 2020-2024. Berikut adalah Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pusat PUU sebagaimana terlihat dalam Tabel 3:2

16

¹ Modul Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, hlm. 3.

² Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2021.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pusat PUU Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program/Kegiatan			
	1. Persentase UU		
	yang ditetapkan		
	dan dilengkapi	100%	
	Naskah Akademis		
	dan kajian RUU		
	2. Persentase RUU		
Terwujudnya dukungan	yang memiliki		
penyusunan naskah	konsep awal	100%	
akademik RUU, Draft	Naskah		
RUU dan Pembahasan	Akademis, Draf		
RUU terkait dengan	RUU dan kajian		
pelaksanaan Fungsi	RUU		Rp.
Legislasi DPR RI	3. Indeks kepuasan		20.953.598.000,-
	Anggota DPR RI		
	atas layanan	3,22	
	Perancangan		
	Undang-Undang		
	4. Persentase		
	realisasi		
	anggaran Pusat	95%	
	Perancangan		
	Undang-Undang		

Cascading Perjanjian Kinerja Pusat PUU

No	Sasaran	Indikator Kerja		Sasaran Indikator Kerja Target	
	Program				
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan Naskah Akademik RUU, Draf RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1.	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	
	Egislasi Di K	2.	Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%	
		3.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Perancangan Undang-Undang	3,22	
	(4.	Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang	95%	

Sasaran Program/Kegi -atan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terlaksananya	Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	100%	
dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan Pembahasan RUU terkait	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draf RUU dan kajian RUU	100%	Rp. 20.647.363.000,
dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademik dan Draft RUU	3,22	
	4. Persentase penyerapan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang	92,5%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP memuat pengukuran kinerja sebagai bentuk penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat PUU yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis (renstra) tahun 2020-2024. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pusat PUU sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian bidang legislasi kepada DPR RI perlu menetapkan sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan unit tersebut. Sasaran strategis Pusat PUU adalah meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang dilaksanakan melalui

unsur dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam penyusunan konsep awal naskah akademik dan draf RUU.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Pusat PUU dapat dilakukan melalui kegiatan analisis akuntabilitas kinerja dan aspek keuangan. Analisis akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja, penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat PUU dalam membiayai kegiatan penyusunan NA dan RUU pada tahun 2022 disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan.

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan target kinerja Pusat PUU disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat PUU, mengingat pelaksanaan tugas fungsi legislasi DPR RI dalam penyiapan konsep awal NA dan draf RUU dilaksanakan oleh Pusat PUU berdasarkan pada permintaan dari AKD, dan mengacu pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 yang merupakan usul DPR RI.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penyiapan dan penyajian NA dan draf RUU, maka Pusat PUU akan senantiasa memenuhi permintaan tersebut. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan permintaan AKD terhadap NA dan draf RUU, maka dilakukan perubahan atau revisi DIPA. Oleh karena itu, target dalam pelaksanaan tugas Pusat PUU bergantung pada berapapun jumlah yang diminta oleh AKD.

Untuk tahun 2022, Pusat PUU telah menetapkan target sebagaimana tercantum dalam dokumen baik RKT maupun PK, dengan mempertimbangkan permintaan AKD, Prolegnas Prioritas Tahun 2022, sumber daya manusia, dan anggaran.

Secara keseluruhan, untuk target kinerja sehubungan dengan penetapan kinerja tahun 2022 terkait persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi NA dan kajian RUU, serta persentase RUU yang memiliki konsep awal NA, draf RUU dan kajian RUU, Pusat PUU telah menetapkan target dalam satuan dokumen sebanyak 18 (delapan belas) konsep awal NA dan draf RUU.

Adapun selama tahun 2022, Pusat PUU telah melakukan/mengikuti (asistensi) kegiatan terkait penyusunan sebanyak 74 (tujuh puluh lima) konsep awal NA dan draf RUU baik berdasarkan permintaan pimpinan DPR RI, pimpinan AKD, pimpinan fraksi maupun perseorangan. Secara lebih rinci permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

Permintaan Penyusunan Konsep Awal NA dan Draf RUU

Tahun 2022

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
1.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Timur	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
2.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Tengah	
3.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Utara	
4.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Deli Serdang	
5.	NA dan RUU tentang Kota	
	Medan	
6.	NA dan RUU tentang Kota	Komisi II
	Tebing Tinggi	
7.	NA dan RUU tentang Kota	
	Pematang Siantar	
8.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Simalungun	
9.	NA dan RUU tentang	Komisi VI
	Perlindungan Konsumen	
10.	NA dan RUU tentang	Komisi VII
	Minyak dan Gas Bumi	
11.	NA dan RUU tentang Lalu	Komisi V
	Lintas dan Angkutan Jalan	
12.	NA dan RUU tentang	Anggota DPR RI
	Industri Strategis	Fraksi Golkar
	Perkebunan	
13.	NA dan RUU tentang	Anggota DPR RI
	Perlindungan dan	Fraksi PDIP
	Pemberdayaan Pasar	
	Rakyat	
14.	NA dan RUU tentang	Fraksi PKS
	Kewirausahaan Nasional	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
15.	NA dan RUU tentang	Komisi VI
	Larangan Praktik Monopoli	
	dan Persaingan Usaha	
	Tidak Sehat	
16.	NA dan RUU tentang	Pimpinan Baleg
	Pembentukan Kabupaten	
	Moutong	
17.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Statistik	
18.	NA dan RUU tentang Badan	Badan Legislasi
	Usaha Milik Negara	
19.	NA dan RUU tentang	Komisi XI
	Pengembangan dan	
	Penguatan Sektor	
	Keuangan	
20.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Konservasi Sumber Daya	
	Alam Hayati dan	
	Ekosistemnya	
21.	NA dan RUU tentang Energi	Badan Legislasi
	Baru dan Energi	
	Terbarukan	
22.	NA dan RUU tentang	Anggota DPR RI
	Kekarantinaan	Fraksi
23.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Keimigrasian	
24.	NA dan RUU tentang	
	Advokat	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
25.	NA dan RUU tentang	
	Pembentukan Provinsi	Badan Legislasi
	Sulawesi Timur	
26.	NA dan RUU tentang	
	Pembentukan Kabupaten	
	Batui Toili	
27.	NA dan RUU tentang	
	Pembentukan Kabupaten	
	Tombotika	
28.	NA dan RUU tentang Kota	
	Binjai	
29.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Karo	
30.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Langkat	
31.	NA dan RUU tentang Kota	
	Sibolga	
32.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Nias	
33.	NA dan RUU tentang Kota	Komisi II
	Banda Aceh	
34.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Besar	
35.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Pidie	
36.	NA dan RUU tentang Kota	
	Pangkal Pinang	
37.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Bangka	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
38.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Belitung	
39.	NA dan RUU tentang Satu	Ketua BURT
	Data Indonesia	
40.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Pemerintahan Aceh	
41.	NA dan RUU tentang	Komisi III
	Penyadapan	
42.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Pembentukan Kabupaten	
	Tomini Raya	
43.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Barat	
44.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Aceh Selatan	
45.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Tapanuli Utara	
46.	NA dan RUU tentang	
	Tapanuli Tengah	Komisi II
47.	NA dan RUU tentang	
	Tapanuli Selatan	
48.	NA dan RUU tentang	
	Kabupaten Asahan	
49.	NA dan RUU tentang	
	Labuhanbatu	
50.	NA dan RUU tentang Kota	
	Tanjungbalai	
51.	NA dan RUU tentang	Komisi X
	Sistem Pendidikan Nasional	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
52.	NA dan RUU tentang	Fraksi PKS
	Perlindungan Tokoh Agama	
	dan Simbol Agama	
53.	NA dan RUU tentang Wakaf	Komisi VIII
54.	NA dan RUU tentang	Komisi VIII
	Pengelolaan Zakat	
55.	NA dan RUU tentang Cipta	Badan Legislasi
	Kerja	
56.	NA dan RUU tentang	Anggota Komisi VI
	Permuseuman	DPR
57.	NA dan RUU tentang Anak	Komisi VIII
	Yatim dan/atau Piatu	
58.	NA dan RUU tentang	Kepala Badan
	Pendidikan Kedokteran	Keahlian DPR RI
	Hewan	
59.	NA dan RUU tentang	Komisi VIII
	Penyelenggaraan Haji dan	
	Umrah	
60.	NA dan RUU tentang	Komisi X
	Kepariwisataan	
61.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Kesehatan (<i>Omnibus Law</i>)	
62.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Larangan Minuman	
	Beralkohol	
63.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Perlindungan Pekerja	
	Rumah Tangga	
64.	NA dan RUU tentang	Komisi II
	Kabupaten Parigi	

No.	Judul NA dan Draf RUU	Permintaan
		Penyusunan
65.	NA dan RUU tentang	Komisi VIII
	Kesejahteraan Lanjut Usia	
66.	NA dan RUU tentang	Komisi IX
	Pengawasan Obat dan	
	Makanan	
67.	NA dan RUU tentang	Fraksi PKB
	Kesejahteraan Ibu dan	
	Anak	
68.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Pendidikan Kedokteran	
69.	NA dan RUU tentang	Komisi III
	Narkotika	
70.	NA dan RUU tentang	Komisi X
	Keolahragaan	
71.	NA dan RUU tentang	Badan Legislasi
	Tindak Pidana Kekerasan	
	Seksual	
72.	NA dan RUU tentang	Komisi II
	Provinsi Riau	
73.	NA dan RUU tentang	Komisi X
	Pendidikan Layanan	
	Psikologi	
74.	NA dan RUU tentang	Komisi II
	Provinsi Sulawesi Tengah	



Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat PUU



Foto kegiatan RUU tentang Perlindungan Konsumen



Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang POLHUKHAM

Terdapat 360 permintaan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dapat diselesaikan sebanyak 63 Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sedangkan anggaran tahun 2022 yang tersedia hanya untuk 18 Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang

- 1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi
- 2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong
- 3. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 4. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 5. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat
- 6. RUU tentang Provinsi Riau
- 7. RUU tentang Provinsi Jambi
- 8. RUU tentang Provinsi Maluku
- 9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya
- 10. RUU tentang Provinsi Papua
- 11. RUU tentang Provinsi Papua Barat
- 12. RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya
- 13. RUU tentang Provinsi Papua Selatan
- 14. RUU tentang Provinsi Papua Tengah
- 15. RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan
- 16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya
- 17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1990 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 18. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
- 19. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
- 20. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- 21. RUU tentang Larangan Minjuman Beralkohol
- 22. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- 23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

- 24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 25. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
- 26. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 27. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
- 28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- 29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 30. RUU tentang Satu Data Indonesia
- 31. RUU tentang Provinsi Sumatera Utara
- 32. RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan
- 33. RUU tentang Provinsi Jawa Barat
- 34. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah
- 35. RUU tentang Provinsi Jawa Timur
- 36. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah
- 37. RUU tentang Kabupaten Aceh Besar
- 38. RUU tentang Kabupaten Pidie
- 39. RUU tentang Kota Banda Aceh
- 40. RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah
- 41. RUU tentang Kabupaten Aceh Timur
- 42. RUU tentang Kabupaten Aceh Utara
- 43. RUU tentang Kabupaten Aceh Barat
- 44. RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan
- 45. RUU tentang Kota Pangkal Pinang
- 46. RUU tentang Kabupaten Bangka
- 47. RUU tentang Kabupaten Belitung
- 48. RUU tentang Kabupaten Karo
- 49. RUU tentang Kabupaten Langkat
- 50. RUU tentang Kota Binjai
- 51. RUU tentang Kota Medan

- 52. RUU tentang Kabupaten Deli Serdang
- 53. RUU tentang Kota Tebing Tinggi
- 54. RUU tentang Kabupaten Asahan
- 55. RUU tentang Kabupaten Labuanbatu
- 56. RUU tentang Kota Tanjung Balai
- 57. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara
- 58. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah
- 59. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan
- 60. RUU tentang Kabupaten Pematangsiantar
- 61. RUU tentang Kabupaten Simalungun
- 62. RUU tentang Kabupten Nias
- 63. RUU tentang Kota Sibolga

Berdasarkan data tersebut maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja Pusat PUU pada tahun 2022 adalah sebagaimana tertera pada Tabel 5 Capaian Kinerja Pusat PUU Tahun 2022 di bawah ini:

Tabel 5
Capaian Kinerja Pusat PUU Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Strategis				Kinerja
	1. Persentase UU yang			
	ditetapkan dan	100%	166,6%	100%
Terlaksananya	dilengkapi Naskah	18 dok	30 dok	
dukungan	Akademis dan			
penyusunan	Kajian RUU			
naskah				
akademik RUU,	2. Persentase RUU			
draft RUU, dan	yang memiliki			
Pembahasan	konsep awal Naskah	100%	350%	100%
RUU terkait	Akademis, Draf	18 dok	63 dok	
dengan	RUU dan Kajian			
3	RUU			

pelaksanaan	3. Indeks kepuasan			
Fungsi Legislasi	Anggota DPR RI atas	3,22	3,22	3,294
DPR RI	kualitas RUU			
	4. Persentase			
	penyerapan	95%	99,15%	104,37%
	anggaran Pusat			
	Perancangan			
	Undang-Undang			

Berdasarkan capaian kinerja dalam Tabel 5, maka pada tahun 2022 target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel, meskipun kinerja Pusat PUU dalam hal penyusunan konsep awal NA dan draf RUU sangat bergantung pada permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI sebagai lembaga politik.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, Pusat PUU mengalami peningkatan kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Perbandingan Capaian Kinerja Pusat PUU
Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target			Realisas	i	Cap	aian Ki	nerja
								222		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	202 0	2021	2022
	1.Persentase UU									
	yang ditetapkan									
	dan dilengkapi	20	18	18	16	18	30	85%	100	166,6
	Naskah	dok	dok	dok	dok	dok	dok		%	%
Terlaksananya	Akademis dan									
dukungan	kajian RUU									
penyusunan naskah										
akademik RUU,										

Draft RUU dan	2.Persentase RUU									
Pembahasan RUU	yang memiliki									
terkait dengan	konsep awal	20	18	18	16	18	63	85%	100	350%
pelaksanaan Fungsi	Naskah	dok	dok	dok	dok	dok	dok		%	
Legislasi DPR RI	Akademis, Draf									
	RUU dan kajian									
	RUU									
	3.Indeks									
	kepuasan									
	Anggota DPR RI	3,2	3,22	3,294	3,2	3,22	3,294	3,2	3,22	3,294
	atas kualitas									
	Naskah									
	Akademik dan									
	Draft RUU									
	4.Persentase									
	penyerapan									
	anggaran Pusat	90%	92,5	95%	99,32	98,79	99,15	99,3	98,7	104,3
	Perancangan		%		%	%	%	2%	9%	7%
	Undang-Undang									

Adapun hasil pelaksanaan tugas Pusat PUU pada tahun 2022 berupa konsep awal NA dan draf RUU sebagai *output* untuk kemudian ditindaklanjuti Kepala Badan Keahlian DPR RI dan disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya sebagai bahan DPR RI dalam pembentukan undang-undang, terlihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7

Tindak Lanjut NA dan Draf RUU di Alat Kelengkapan Dewan

No.	NA dan RUU	Tindak Lanjut
1.	NA dan RUU tentang Badan	
	Usaha Milik Negara	
2.	NA dan RUU tentang	
	Pengawasan Obat dan	
	Makanan	
3.	NA dan RUU tentang Provinsi	Harmonisasi
	Papua	

4.	NA dan RUU tentang Provinsi	
4.		
	Papua Barat	
5.	NA dan RUU tentang	Telah selesai dilakukan
	Pembentukan Provinsi	Harmonisasi di Badan
	Kepulauan Papua Utara	Legislasi
6.	NA dan RUU tentang Ibu Kota	Disetujui dalam Rapat
	Negara	Paripurna 18 Januari 2022
7.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Sulawesi Selatan	
8.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Sulawesi Utara	
9.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Sulawesi Tengah	Disetujui dalam Rapat
10.	NA dan RUU tentang Provinsi	Paripurna 15 Februari
	Sulawesi Tenggara	2022
11.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Kalimantan Selatan	
12.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Kalimantan Barat	
13.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Kalimantan Timur	
14.	NA dan RUU tentang	
	Keolahragaan	
15.	NA dan RUU tentang Tindak	Disetujui dalam Rapat
	Pidana Kekerasan Seksual	Paripurna 12 April 2022
16.	NA dan RUU tentang	Disetujui dalam Rapat
	Pembentukan Peraturan	Paripurna 24 Mei 2022
	Perundang-Undangan	
17	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Papua Selatan	
18.	NA dan RUU tentang Provinsi	1
	Papua Tengah	
		1

19.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Papua Pegunungan	
20.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Sumatera Barat	Disetujui dalam Rapat
21.	NA dan RUU tentang Provinsi	Paripurna 30 Juni 2022
	Jambi	
22.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Riau	
23.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Nusa Tenggara Barat	
24.	NA dan RUU tentang Provinsi	
	Nusa Tenggara Timur	
25.	NA dan RUU tentang	
	Pemasyarakatan	Disetujui dalam Rapat
26.	NA dan RUU tentang	Paripurna 7 Juli 2022
	Pendidikan dan Layanan	
	Psikologi	
27.	NA dan RUU tentang	Disetujui dalam Rapat
	Perlindungan Data Pribadi	Paripurna 20 September
		2022
28.	NA dan RUU tentang	Disetujui dalam Rapat
	Pembentukan Provinsi Papua	Paripurna 17 November
	Barat Daya	2022
29.	NA dan RUU tentang Kitab	Disetujui dalam Rapat
	Undang-Undang Hukum	Paripurna 6 Desember
	Pidana	2022
30.	NA dan RUU tentang	Disetujui dalam Rapat
	Pengembangan dan Penguatan	Paripurna 15 Desember
	Sektor Keuangan	2022

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa *output* kinerja Pusat PUU berupa konsep awal NA dan RUU dapat diterima dan menjadi bahan bagi DPR RI dalam hal ini AKD untuk membentuk undang-undang usul inisiatif DPR RI.

Di samping melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan draf RUU, Pusat PUU juga ikut serta dalam penyusunan beberapa peraturan Sekretaris Jenderal dengan perincian sebagai berikut:

- Persekjen tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekjen DPR RI
- 2) Persekjen Sistem Keamanan Informasi Sekjen DPR RI
- Persekjen Pendampingan Sekretariat dalam Kunjungan Kerja Anggota dan AKD
- 4) Persekjen tentang Tata Beracara MKD
- 5) Persekjen tentang Kode Etik Anggota
- 6) Persekjen tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PTT, Kelompok Pakar atau Tim Ahli, TA dan Staf Administrasi Anggota di Sekjen DPR RI
- 7) Persekjen tentang Kode Etik Sistem Pendukung
- 8) Persekjen tentang Pengelolaan TA dan Staf Administrasi Anggota DPR RI
- 9) Persekjen tentang Pengelolaan PPNPN Sekjen dan BK DPR RI
- 10) Persekjen tentang Protokol
- 11) Persekjen tentang Staf Khusus Pimpinan

Selanjutnya, berkaitan dengan capaian dalam rangka peningkatan dukungan kegiatan dewan di bidang legislasi, Pusat PUU telah membentuk Tim *Quick Wins* untuk menyusun Pedoman *Regulatory Impact Ananlysis* (RIA) dalam rangka peningkatan kualitas NA dan RUU. Pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU sejalan dengan arah pengembangan BKD sebagai unit pendukung DPR RI di bidang legislasi, serta sesuai dengan motto "*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament Evidence Based Legislative Policy Making*".

Pedoman RIA yang disusun ini merupakan panduan bagi Tim Penyusun NA dan RUU dalam menyusun laporan RIA atas suatu NA dan RUU. Pedoman RIA bertujuan agar Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI memiliki prosedur kerja dalam penerapan metode RIA yang digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan sehingga setiap NA dan RUU yang tersusun didukung evidence based legislative policy making yang merupakan hasil analisis yang substantif, praktis, komunikatif, dan solutif guna membantu pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal sebagai norma baru dalam setiap RUU.

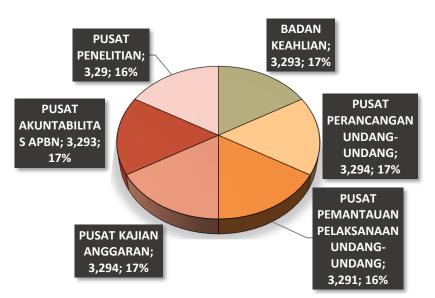
Selanjutnya, beberapa inovasi juga telah dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran di lingkungan Pusat PUU seperti penggunaan aplikasi cloud, email group, dan breakrooms untuk memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen kerja dan pelaksanaan kegiatan di Pusat PUU, penambahan konten Binta (Bincang dengan Anggota) dan konten Q & A (Question and Answer) pada akun Instagram Pusat PUU untuk membahas isu RUU tertentu dan sebagai upaya menjaring pertanyaan dari masyarakat, serta penambahan fitur auto reply pada menu SIMAS PUU dan membuat akun Medsos Pusat PUU (Instagram, Facebook, dan Twitter) untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dan publikasi terhadap hasil penyusunan NA dan RUU di Pusat PUU.

2. Indeks Kepuasan Anggota DPR Atas Layanan Perancangan Undang-Undang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal satu kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Untuk kebutuhan tersebut telah dilakukan survei kepuasan terhadap Badan Keahlian oleh Anggota DPR RI periode tahun 2019-2024 dengan total 231 responden yang terdiri dari 9 fraksi di DPR RI. Survei kepuasan

Anggota DPR RI sebagai penerima layanan keahlian diukur berdasarkan indeks kepuasaan Anggota DPR RI terhadap 5 (lima) pusat yang ada lingkungan Badan Keahlian.

Sesuai hasil survei, indeks kepuasan anggota terhadap kinerja



Badan Keahlian adalah 3,293. Indeks kepuasan terhadap Badan Keahlian dan kelima unsur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan gambar tersebut **Pusat PUU memiliki indeks kepuasan tertinggi yakni sebesar 3,294** dan berkontribusi terhadap indeks kepuasan terhadap Badan Keahlian.

Hasil survei tersebut juga dapat menjadi tolak ukur capaian keberhasilan kinerja Pusat PUU. Perbandingan antara target dan realisasi indeks kepuasan anggota terhadap Pusat PUU atas layanan Perancangan Undang-Undang, maka capaian kinerja indeks kepuasan Anggota adalah sebesar 102,2%. Realisasi indeks kepuasan Anggota DPR terhadap kinerja Pusat PUU bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam renstra Badan Keahlian Tahun 2024.

3.3. Realisasi Anggaran

Kebutuhan pendanaan pada program dukungan keahlian fungsi dewan adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin, yaitu untuk kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draf RUU. Pagu anggaran atau DIPA Pusat PUU Tahun 2022 dipergunakan untuk penyusunan naskah akademik dan RUU dengan berbagai kegiatan, seperti rapat-rapat penyusunan, mengundang narasumber, kegiatan pengumpulan data dalam kota ataupun luar kota, kegiatan uji konsep ke daerah, dan pelaksanaan seminar/FGD/workshop. Pagu Anggaran atau DIPA awal Pusat PUU Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.760.173.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Pagu Anggaran Pusat PUU telah mengalami revisi beberapa kali.

Tabel 8
Pagu Anggaran Pusat PUU Tahun 2022

Program	Pagu Anggaran
Program dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU	Rp. 13.760.173.000,-
Jumlah	Rp. 13.760.173.000,-

Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU, realisasi anggaran Pusat PUU Tahun 2022 sebesar Rp. 13.643.244.388,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Artinya dalam kinerja keuangan, Pusat PUU bisa mencapai target realisasi anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RKT Tahun 2022. Namun, jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi anggaran, sebagaimana tergambar dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9

Realisasi Anggaran Pusat PUU

Perbandingan Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Program	Pagu Ang	Pagu Anggaran (Rp)		ggaran (Rp) & ian (%)
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
Dukungan				
Keahlian				
Dalam	9.007.352.000	13.760.173.000	8.898.478.000	13.643.244.388
Penyusunan			(98,79%)	(99,15%)
NA dan				
RUU				

Peningkatan realisasi anggaran Pusat PUU pada tahun 2022 disebabkan karena permintaan NA dan RUU juga lebih banyak, sehingga pelaksanaan kegiatan di Pusat PUU juga semakin banyak melakukan perjalanan dinas keluar daerah dengan agenda kegiatan pengumpulan data maupun uji konsep.

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pusat PUU Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada DPR RI khususnya atas penyiapan, penyusunan, dan penyajian NA dan RUU inisiatif DPR RI yang semakin tinggi.

Jika dilihat dari target kinerja dan realisasi yang telah dicapai oleh Pusat PUU, maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja untuk dukungan keahlian dalam hal penyusunan NA dan RUU tahun 2022 adalah sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU, realisasi anggaran Pusat PUU Tahun 2022 sebesar Rp 13.643.244.388,-.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari sasaran strategis Pusat PUU, yaitu meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

- Terpenuhinya target persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi naskah akademis dan kajian RUU serta persentase RUU yang memiliki konsep awal naskah akademis, draf RUU dan kajian RUU sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat PUU Tahun 2022.
- 2. Serapan anggaran Pusat PUU Tahun 2022 dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,15% (dari target sebesar 95%).

B. HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pusat PUU dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

- Penyusunan NA dan RUU masih ditentukan oleh permintaan DPR RI, baik permintaan dari pimpinan DPR RI, pimpinan AKD, pimpinan fraksi, maupun dari anggota DPR RI secara perorangan. Tahun 2022, permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU diterima oleh Pusat PUU menjelang akhir tahun sehingga penyusunan NA dan RUU belum sepenuhnya dapat diselesaikan.
- 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terpenuhi, seperti ruang kerja dan ruang rapat internal dan ketersedian computer PC/laptop yang masih sangat terbatas.
- 3. Sumber daya manusia yang dimiliki Pusat PUU tidak seimbang dengan proporsi jumlah dan kompetensi SDM namun dituntut untuk bekerja secara optimal dalam memberikan dukungan layanan keahlian Perancangan Undang-Undang. Jumlah tenaga struktural (tata usaha) terbatas dalam mendukung administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan penyusunan NA dan RUU. Selain itu tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki masih belum komprehensif apabila dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPR RI di bidang keahlian legislasi.
- 4. Anggaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang seringkali tidak mencukupi dibandingan dengan banyaknya permintaan dari Alat Kelengkapan Dewan, pimpinan fraksi, maupun Anggota DPR untuk dukungan keahlian perancangan undang-undang. Permintaan Penyusunan NA dan draf RUU sebanyak 350, adapun Anggaran yang terseia hanya untuk 18 NA dan draf RUU.
- 5. Pembukaan blokir anggaran pada Bulan November 2022 hanya sebesar Rp. 200.000.000,- dari Rp. 1.342.262.000,- menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat

dilaksanakan, dan beberapa kegiatan terpaksa dilakukan secara *hybrid*

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, Pusat PUU melakukan beberapa cara, yaitu:

- 1. Melakukan perbaikan kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dan peningkatan profesionalisme kerja.
- 2. Optimalisasi pembagian beban kerja antara staf tata usaha sekaligus memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan bimtek/pelatihan/kursus/seminar, baik kepada SDM (perancang undang-undang) maupun SDM lainnya (administrator) agar lebih optimal dalam memberikan dukungan kepada DPR RI (AKD) dalam pembentukan undang-undang.
- 3. Meningkatkan koordinasi antara unit yang terkait untuk mendapatkan informasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI (AKD) agar dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan Setjen DPR RI, dan meningkatkan koordinasi dengan unit terkait secara terus menerus guna pemenuhan sarana dan prasarana.
- 4. Melakukan diskusi secara virtual melalui aplikasi Zoom.
- Perlu evaluasi tambahan pengganggaran disesuaikan dengan RUU Prioritas Prolegnas
- 6. Melakukan optimalisasi anggaran yang tidak terserap

Demikian laporan kinerja Pusat PUU tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat PUU atas capaian kinerjanya dalam rangka menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2022. Harapan kami semoga laporan kinerja ini menjadi upaya mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran sekaligus sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja di jajaran Pusat PUU di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Jabatan

: Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

<u>Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19650 10 199003 1 007 Jakarta, 21 Desember 2021 Pihak Pertama,

<u>Dr. Lidya Survani Widayati, S.H., M.H.</u> NIP. 19700429 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No. Sasaran Program			Indikator Kinerja	Target		
(1)	(1)		(2)			
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draf RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1.	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%		
		2.	Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%		
		3.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang Undang	3,22		
		4.	Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang Undang	95%		

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp20.953,598.000,-

Kepala Badan Keahlian,

<u>Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196507 0 199003 1 007 Jakarta, 21 Desember 2021 Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

<u>Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.</u> NIP. 19700429 199803 2 001